

SKRIPSI

R. HERLAMBAH PERDANA W.

KEBIJAKAN PENANGGUHAN UPAH BURUH DI INDONESIA

(STUDI KASUS PERUSAHAAN SEPATU DI PT. WITRAINTI
JAYASAKTI SURABAYA)



KK
Per 2409/98
Her
h

ST. 11.2.10

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998

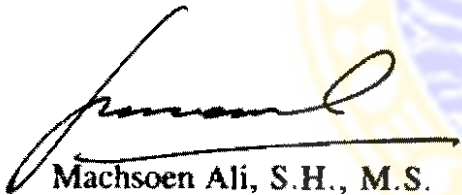
**KEBIJAKAN PENANGGUHAN UPAH BURUH
DI INDONESIA
(STUDI KASUS PERUSAHAAN SEPATU DI PT. WITRAINTI
JAYASAKTI SURABAYA)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA STRATA SATU BIDANG ILMU HUKUM**

Pembimbing,

Penyusun,



Machsoen Ali, S.H., M.S.

NIP. 130 355 366



R. Herlambang-Perdana W.

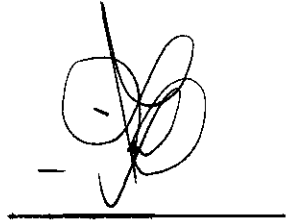
NIM. 039414035

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1998**

Diuji pada : **Senin, 9 Februari 1998.**

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : R. Indiarso, S.H., M.Hum.



2. Sekretaris : Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.



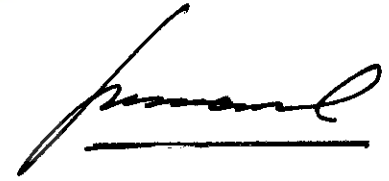
3. Anggota : 1. Dr. M. L. Souhoka, S.H., M.S.



2. H. Samzari Boentoro, S.H.



3. Machsoen Ali, S.H., M.S.



BAB VI

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Uraian mengenai kebijakan penanggulangan upah buruh di Indonesia sangatlah kompleks sekali, terutama kajian yang dilakukan dalam mencermati persoalan-persoalan yang terjadi tidak saja berdimensi hukum (yuridis-normatif) namun juga berkaitan erat realitas yang melingkupi dunia perburuhan (socio-yuridis). Rangkaian analisis dalam skripsi mengenai kajian yuridis terhadap kebijakan penanggulangan upah buruh di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep pengupahan buruh di Indonesia merupakan konsep yang mengacu dari beberapa sistem perekonomian, namun memiliki karakteristik yang membedakan dengan konsep-konsep pengupahan yang lain. Ini disebabkan sistem perekonomian di Indonesia dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga *dalam hal pengupahan peranan pemerintah sangat dominan atau kuat* dalam mengontrol pasar tenaga kerja, menciptakan kestabilan dan keseimbangan kekuatan ekonomi, serta mencegah adanya persaingan tidak sehat yang dapat mengganggu kepentingan buruh. Sedangkan peraturan upah buruh di Indonesia masih menunjukkan adanya peraturan yang merugikan kepentingan buruh, yakni Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 yang memberikan peluang kepada perusahaan untuk tidak

membayar ketentuan UMR yang baru, atau membayar di bawah ketentuan UMR.

2. Adanya penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 menunjukkan *hilangnya hak-hak buruh untuk mendapatkan upah yang seharusnya diterima olehnya*. Hal tersebut dapat terlihat pada prinsip bahwa pengusaha tidak berkewajiban membayar kekurangan upah yang ditangguhkan sampai pada batas waktu tertentu itu (Pasal 14 ayat (2) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997). Padahal secara esensi kebijakan pemerintah mengenai upah yang dikeluarkan melalui Permenaker tersebut adalah untuk memberikan jaminan kepada buruh agar upahnya tidak dibayar murah oleh pengusaha secara sewenang-wenang (sebagai jaring pengaman), namun justru dalam Permenaker itu sendiri yang mengecualikan pelaksanaan upah sebagai jaring pengaman dengan melalui pengajuan permohonan penangguhan upah. Sebagai akibat dari pengecualian tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan penangguhan upah merupakan ketentuan yang menimbulkan *ketidakpastian hukum*, dan dalam konteks ini *hak-hak buruh yang menjadi termarginalkan*.
3. Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 secara tegas menyatakan pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah buruhnya di bawah ketentuan UMR (Pasal 8), dan pengusaha yang menyimpangi ketentuan pasal tersebut maka dikatakan telah melakukan pelanggaran (Pasal 17 ayat (2)). Namun dalam Permenaker tersebut juga terdapat aturan penangguhan upah yang memungkinkan pengusaha membayar kurang dari ketentuan UMR (Pasal 13

sampai Pasal 16), sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan penangguhan upah tersebut merupakan *pengecualian dari ketentuan pelanggaran*. Bila tetap membayar di bawah UMR maka pengusaha dapat dikenai sanksi Pasal 17 ayat (1) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997, yakni dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Penyelesaian hukum melalui pasal ini terlalu ringan bagi pengusaha, sehingga dapat dikatakan bahwa *Pasal 17 ayat (1) Permenaker tersebut tidak efektif* untuk menangkal pengusaha yang membayar upah buruhnya di bawah ketentuan UMR. Sedangkan alternatif terakhir akibat ditolaknya permohonan penangguhan upahnya adalah *penutupan perusahaan*. Alternatif terakhir yang berupa penutupan perusahaan sangatlah mungkin terjadi, akan tetapi yang perlu dicermati adalah keberadaan buruh itu sendiri yang sangat dirugikan, karena memang posisi tawar buruh sangat rendah saat penutupan perusahaan.

2. S a r a n

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, *penulis* akan menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mencermati kebijakan penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997.

1. Perlu adanya keberanian dari pemerintah untuk *menolak segala bentuk konsep pengupahan murah yang menjadi syarat investor menanamkan modalnya di Indonesia*, karena dengan mengikuti syarat investor tersebut berarti pemerintah lebih memihak kepada investor daripada untuk kepentingan buruh

yang jumlahnya menyangkut nasib jutaan masyarakat kelas bawah. Selain itu *perlu dipertimbangkan untuk mengubah sistem pengupahan yang mendasarkan suatu kewilayahan tertentu (upah minimum regional) menjadi sistem pengupahan yang mendasarkan pada masing-masing sektor industri.* Konsep yang demikian diharapkan dapat menghindari adanya kesenjangan upah yang menyebabkan ketimpangan dalam suatu perusahaan. Sedangkan peraturan upah buruh di Indonesia masih dirasakan bahwa Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 khususnya Bab V, telah menghilangkan hak-hak buruh untuk mendapatkan pengupahan yang seharusnya diterima oleh buruh dengan ketentuan UMR baru. Mengutip pemikiran *Adnan Buyung Nasution*, apapun antisipasi terhadap keadaan hukum di Indonesia di masa mendatang seyogyanya adalah hukum yang dilandasi oleh suatu sistem hukum yang mampu memenuhi kebutuhan normatif masyarakat sekaligus dapat pula bertindak sebagai “penentu” arah perkembangan masyarakat.⁶⁹ Oleh karena itu, segala bentuk peraturan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak seharusnya lebih diperhatikan menuju ke arah yang lebih baik.

2. Mencermati mengenai sulitnya pengusaha untuk membayar upah buruh di atas ketentuan UMR, bukan disebabkan produktivitas kerja buruh yang kurang melainkan lebih banyak disebabkan adanya biaya siluman (*invisible cost*, baik siluman ekonomis maupun politis) yang terlalu besar jumlahnya. Adanya biaya

⁶⁹ Dr. Adnan Buyung Nasution, Perspektif Pembangunan Hukum Masa Mendatang, Makalah Seminar pada 20-21 November 1995, Sema FISIP Unair.

siluman semacam ini telah menjadi rahasia umum yang justru menjadi penyakit yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memiliki *kemauan yang kuat untuk menghapus biaya siluman* tersebut, sehingga akan tercipta suatu tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa upah buruh di Indonesia masih belum mencerminkan keadaan upah yang sebenarnya (upah riil), sehingga adanya ketentuan penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 justru semakin menambah beban penderitaan bagi buruh untuk menanggung kebutuhan hidupnya. Selama belum dihapusnya biaya siluman dan belum adanya pengupahan yang mencerminkan upah riil, maka penulis mengusulkan *ketentuan penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker tersebut untuk dihapuskan*.

3. Beberapa fakta yang diuraikan dalam Bab V, telah memperlihatkan bahwa posisi buruh berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kesepakatan penangguhan upah (bipartit). Dan semakin menunjukkan bahwa dalam hal penangguhan upah, Dirjen Binawas Ketenagakerjaan lebih memihak kepada pengusaha, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Keputusan yang memprioritaskan perusahaan tekstil, sepatu, dan mainan anak untuk mengecualikan pelaksanaan ketentuan Kepmenaker Nomor KEP-06/MEN/1997. Tentu pemihakan kepada pengusaha tersebut semakin memperburuk kepentingan buruh yang seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih besar. Kondisi ini semakin nyata ketika Presiden Soeharto menegur Apresindo (Asosiasi Perusahaan Sepatu Indonesia) untuk tidak menyuruh

anggotanya menunda pembayaran UMR yang baru. Realitas ini melahirkan dugaan yang semakin kuat bahwa pengusaha melakukan rekayasa dalam hal penangguhan upah. Sehingga dapat disadari bahwa *penyelesaian hukum melalui mekanisme Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 tidak hanya mekanisme satu-satunya yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan penangguhan upah*, karena dugaan tersebut harus lebih dikaji lebih dalam dan dicari solusinya sehingga pada akhirnya tercipta keseimbangan dalam hubungan antara majikan dengan buruh.

Demikianlah catatan yang dapat dijadikan bahan bagi semua pihak untuk mengkaji ulang kebijakan penangguhan upah buruh di Indonesia.